

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Adrian Sutedi. 2011.*Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2007.*Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2003.*Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Bewa Ragawino. 2006.*Hukum Administrasi Negara*. FISIP Universitas Padjajaran. Bandung.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Eko Sujatmiko. 2014.*Kamus IPS*. Aksara Sinergi Media. Cetakan pertama. Surakarta.

Harbani Pasolong. 2007.*Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.

Herman Malano. 2011.*Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

KBBI. 1994.*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Kedua. Balai Pustaka. Jakarta.

-----, 1995.*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka. Jakarta.

- Listiani. 2009.*Fleksibilitas Pasar Tradisional*.Pikiran Rakyat. Bandung.
- Louis J. Pignataro. 1973.*Traffic engineering, Theory and practice*.Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta. 2000.*Pengantar Ilmu Hukum*.Alumni. Bandung.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2002.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- . 2005.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1983.*Hukum Administrasi Negara*.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ridwan HR. 2006.*Hukum Administrasi Negara*.Raja Grafindo. Jakarta.
- . 2013.*Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*.Rajawali Pers. Jakarta.
- . 2014.*Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*.Rajawali Pers. Jakarta.
- Sadjjono. 2008.*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*.Laksbang. Yogyakarta.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014.*Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*.Visimedia Pustaka. Jakarta.
- Soehino. 1984.*Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*.Liberty. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 1983.*Penegakan Hukum*.Binacipta. Jakarta.

-----, 2004.*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Kelima)*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sondang P. Siagian. 2004.*Filsafat Administrasi (Edisi Revisi)*.Bumi Aksara. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 1996.*Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*.Liberty. Yogyakarta.

Sugiyono. 2006.*Metode Penelitian Administrasi*.Alfabeta. Bandung.

Syafi'i dan Inu Kencana. 1999.*Ilmu Administrasi Publik*.Rineka Cipta. Jakarta.

Warpani. 1990.*Merencanakan Sistem Pengangkutan*.Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009.*Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*.Grasindo. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Daerah Kota Makassar, Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar.

-----, Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

SUMBER LAINNYA :

Dian Eko Prakoso, *Efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota Makassar (suatu tinjauan sosiologi hukum)*. 2013.

Dien Fitri Awalia Rahman. 2018. *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kota Makassar*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Haru Permadi, *Mengenal Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara*, Harupermedi.lecture.ub.ac.id, diunduh pada hari Selasa 11 Februari 2020 jam 17.00 WITA.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96.

Mohamad Ali Khan, Skripsi: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar”* (Makassar: UNHAS Makassar, 2013).

Syamsul Bahri, Wawancara, PD Pasar Makassar Raya, Makassar, 23 September 2020.

Website : <https://materiips.com/perbedaan-pasar-modern-dan-pasar-tradisional>, diakses pada tanggal 8 Maret 2020, pukul 00:28 WITA.

Website : <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>, diakses pada tanggal 10 februari 2020, pukul 09.37 WITA.

Website : <http://pasarmakassarproutamavisih.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 18.00 WITA.

Website : <https://books.google.co.id/books?id=46esDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false> diakses pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 22.11 WITA.

Yuli Hardianti. 2016. *Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Makassar*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PD. PASAR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR

Jl. Kerung-Kerung No. 68 Makassar, Tlp. 0411-449421, Fax. 0411-448347, info@pasarmakassar.pro



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : 070 /C77/PD. PSR/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURYANTO G. LIWANG**
Jabatan : Direktur Umum
Unit Kerja : PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **KARUNIA MEILIANA MASSELENG**
Nim/Jurusan : B11116560/ Hukum Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (SI) UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar
Judul : **" PENERAPAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL
TANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR "**.

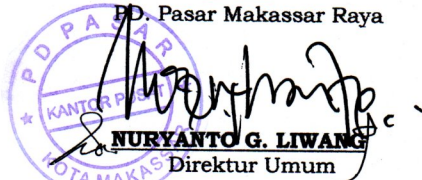
Telah melakukan penelitian dalam lingkup PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar khususnya di Unit Pasar Mandai dan Unit Pasar Terong pada tanggal 03 September 2020 s/d 31 Oktober 2020 sesuai surat izin penelitian Nomor : 070/495/PD. PSR/IX/2020 Tanggal 07 September 2020.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 November 2020

Direksi

PD. Pasar Makassar Raya


NURYANTO G. LIWANG
Direktur Umum

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Makassar Raya di Makassar.
2. Direktur Utama PD. Pasar Makassar Raya di Makassar.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar.
4. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar.
5. Kepala Unit Pasar Mandai di Makassar.
6. Kepala Unit Pasar Terong di Makassar.
7. Mahasiswa yang bersangkutan.
8. Arsip.